



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL JURUSAN MATA KULIAH UMUM**

SILABUS MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Deskripsi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (KU 105)

(Untuk S.1, 2 SKS, Semester 1 dan 2)

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang sudah berjalan sejak dekade 80-an (dulu Kewiraan). Namun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Surat Keputusan DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang, "Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi", yang menyatakan bahwa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, maka sejak Semester Ganjil Tahun Ajaran 2000/2001, Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia-pun mulai memberlakukan hal tersebut, dimana Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diberi-

kan dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru yaitu PKn yang berbasis Pancasila.

Pemberlakuan Mata Kuliah PKn Paradigma baru ini memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, berwawasan global, berjiwa patriotik (cinta tanah air), dan religius, mampu berfikir komprehensif integral dalam membina dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan berdasarkan Falsafah Pancasila dan kesadaran Berkonstitusi UUD 1945. Dalam perkuliahan ini dibahas pengantar memahami mata kuliah pengembangan kepribadian PKn (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKn), Pancasila sebagai filsafat, dasar negara dan ideologi nasional, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, HAM dan Hak dan Kewajiban WNI, Demokrasi dan Negara Hukum, Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara, Geostrategi Indonesia dalam wujud Ketahanan Nasional.

Perkuliahan PKn juga akan mengkaji isu-isu aktual yang relevan dengan topik-topik bahasan, dimana para mahasiswa diminta mencari solusi dengan menggunakan berfikir komprehensif-integral. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori melalui ceramah dan Tanya jawab, dengan menggunakan media LCD, OHP, dan media lain yang tersedia. Disamping itu juga menggunakan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas, penyusunan, dan penyajian makalah, serta diskusi.

Evaluasi PKn dilakukan selain dalam bentuk UTS dan UAS, juga penilaian selama PBM baik sewaktu diskusi dan penyajian makalah, serta kedisiplinan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

Buku sumber yang digunakan adalah : Sudirwo, Daeng (2006). Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor

43/DIKTI/Kep/2006, Bandung, Randu Alas; Ganeswara, Ganjar M., dkk, 2008. Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Bandung, CV Yasindo Multi Aspek; UUD 1945 Pasca Amandemen; Beberapa hal mengenai Filsafat Pancasila (Notonagoro, 1980); Instrumen-instrumen HAM Nasional dan Internasional (PBB); Hukum Laut Internasional (Muchtari K, 1985); Pendidikan Kewarganegaraan (Dikti & Lemhannas,2005); UU Sistem Pendidikan Nasional; UU Otonomi Daerah; UU Pertahanan Negara; UU POLRI.

2. Silabus Mata Kuliah

A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: MPK Pendidikan Kewarganegaraan
Kode Mata Kuliah	: KU 105
Jumlah SKS	: 2 SKS (100 menit)
Semester	: 1 atau 2
Kelompok Mata Kuliah	: MKU (Mata Kuliah Umum)/MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
Jurusan/Program Studi	: Semua Jurusan/Program Studi
Prasyarat	: Tidak ada
Dosen	: Semua Dosen PKN UPI

B. Tujuan Umum Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas,

berwawasan global, berjiwa patriotik, berfikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

C. Deskripsi Isi

Dalam perkuliahan ini dibahas pengantar memahami matakuliah Pengembangan kepribadian PKn (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKn), Pancasila sebagai filsafat, dasar negara dan ideologi nasional, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, HAM dan Hak dan Kewajiban WNI, Demokrasi dan Negara Hukum, Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara, Geostrategi Indonesia dalam wujud Ketahanan Nasional.

D. Proses Pembelajaran

Pendekatan :

Ekspositori dan Inquiri

Metode :

Tanya Jawab, Diskusi, Pemecahan Masalah.

Tugas :

Penyajian kasus, Makalah, analisis artikel

Media :

OHP, LCD, Internet, koran, Majalah

E. Evaluasi

- Kehadiran
- Penyajian masalah
- Makalah
- Analisis Artikel yang bertema Issu-issu aktual materi PKn
- UTS
- UAS

F. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan

Pertemuan 1 : Pengantar Memahami MPK PKn di Perguruan Tinggi

Pertemuan 2 : Pancasila Sebagai Filsafat, Dasar Negaradan Ideologi Nasional

Pertemuan 3 : Identitas Nasional

Pertemuan 4 : Negara dan Konstitusi

Pertemuan 5 : Negara dan Konstitusi (Lanjutan)

Pertemuan 6 : HAM dan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Pertemuan 7 : HAM dan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (Lanjutan)

Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester

Pertemuan 9 : Demokrasi dan Negara Hukum

Pertemuan 10 : Demokrasi dan Negara Hukum (Lanjutan)

Pertemuan 11 : Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara

Pertemuan 12 : Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara
(Lanjutan)

Pertemuan 13 : Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara

Pertemuan 14 : Geostrategi Indonesia dalam Wujud Ketahanan Nasional

Pertemuan 15 : Geostrategi Indonesia dalam Wujud Ketahanan Nasional

Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester

G. Daftar Buku

Buku Utama :

1. Ganeswara, Ganjar M., dkk, (2008). Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Bandung, CV. Yasindo Multi Aspek
2. Sudirwo, Daeng (2006). Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, Bandung, Randu Alas

Referensi :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen
2. Instrumen-instrumen HAM Nasional dan Internasional (PBB)
3. Muchtar K (1983), Hukum Laut Internasional, Bandung : PT Bina Cipta
4. Notonagoro (1980), Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta.
5. Tim Dikti & Lemhannas (2003), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia
6. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
8. Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

9. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Buku-buku teks dalam dan luar negeri yang relevan dengan pokok bahasan, terutama yang dianjurkan oleh dosen di kelas masing-masing.